

**Redaksi**

Penanggung Jawab:  
Dyah N.K. Makhijani  
Pemimpin Redaksi:  
Difi A. Johansyah  
Redaksi Pelaksana:  
Harymurthy Gunawan,  
Rizana Noor, Dedy Irianto,  
Risanty Uli N

**Alamat Redaksi**

Humas Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta  
Telp. : 021 - 3817317,  
3817187  
email : humasbi@bi.go.id,  
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah  
dan mengedit naskah sebelum  
dipublikasikan.

Foto: "Loro Blonyo"  
oleh: Rizana Noor



# gerai info

Edisi XIX | Oktober 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

## MEJA REDAKSI

Pembaca yang budiman,  
Bank adalah lembaga  
yang memainkan peran  
penting sebagai institusi  
intermediasi. Selain itu,

bank juga boleh dikata  
adalah entitas bisnis  
yang menjadi saluran  
bagi transmisi kebijakan  
moneter bank sentral.  
Kedua peran vital  
inilah yang mendasari  
kenapa bank kudu  
diawasi. Pada terbitan  
kali ini, *GERAI INFO*  
mencoba mengangkat  
wajah pengawasan bank  
yang dilakukan oleh  
Bank Indonesia selaku  
otoritas perbankan dan  
moneter. Pembaca juga  
akan diajak berkenalan  
dengan bagaimana  
cara-cara BI melakukan  
pengawasan bank dan  
metode termutakhir  
yang diberlakukan.  
Harapannya, pembaca  
akan semakin *click*  
perihal pengawasan bank.

Juga banyak  
pertanyaan publik  
tentang pengawasan  
bank tatkala ada sebuah  
bank yang menghadapi  
masalah. Umumnya  
publik mempertanyakan,  
kenapa sampai ada  
bank bermasalah  
yang sepeertinya tidak  
terdeteksi pengawas bank.  
Temukan jawabannya di  
*GERAI INFO* edisi 19 ini.

Selamat membaca. ●

Salam,  
Difi A. Johansyah  
Kepala Biro Humas  
Bank Indonesia

## ■ Pengawasan Bank:

# Agar Bank Sehat, Uang Nasabah Selamat, Ekonomi Kuat

Bank adalah bisnis yang punya keunikan tersendiri dibandingkan bisnis lainnya. Hal ini tercermin dari sumber dana operasional bank sebagian besar berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di bank. Oleh karena itu, bank disebut sebagai lembaga kepercayaan. Hilangnya kepercayaan akan mengakibatkan keruntuhan sebuah bank yang pada kondisi tertentu dapat menimbulkan efek domino dalam industri perbankan. Dari sisi aset, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi memainkan peran sangat penting dalam menggerakkan sektor riil dan roda perekonomian. Ibarat urat nadi dalam tubuh manusia, perbankan menjadi saluran yang akan menentukan kelancaran perputaran dana yang merupakan "darah" bagi kelangsungan kegiatan pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, perbankan juga memiliki peran yang sangat vital sebagai jalur transmisi kebijakan moneter yang efektif. Apalagi dengan melihat struktur sistem keuangan nasional yang didominasi oleh sektor perbankan, efektivitas kebijakan moneter akan ditentukan juga oleh respons industri perbankan terhadap kebijakan tersebut. Sebagai contoh, kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi senantiasa mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan. Kelebihan atau kekurangan likuiditas di perbankan berpotensi mempengaruhi tingkat harga yang berdampak pada perubahan angka inflasi, sehingga perlu digelar operasi pasar terbuka (OPT) dengan menyedot atau menggelontorkan likuiditas dari dan ke sistem perbankan.

Melihat peran penting perbankan tersebut di atas, dapat dipahami kenapa industri perbankan sangat memerlukan kepercayaan masyarakat dan kudu dijaga kesehatannya. Oleh karena itu, perbankan merupakan industri yang perlu diatur dan diawasi secara ketat (*highly regulated*) agar senantiasa berjalan dalam koridor kehati-hatian (*prudential*). Hanya bank yang sehat dapat menjaga amanah keamanan uang nasabah dan memainkan peran sebagai penggerak

roda perekonomian. Sekarang bisa dibayangkan kalau sampai ada bank yang bermasalah, yang kebakaran jenggot bukan hanya nasabah tapi juga bisa bikin runyam stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan bahkan dapat mengoyak sendi-sendi perekonomian nasional.

Untuk mengawal perjalanan industri perbankan sesuai koridor kehati-hatian, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan di dalam negeri termasuk bank perkreditan rakyat. Awalnya, pengawasan yang diberlakukan hanya mengedepankan aspek pemenuhan terhadap regulasi yang ditetapkan BI (*compliance approach*). Seiring dengan peningkatan kompleksitas bisnis dan risiko yang dihadapi bank, pengawasan pun mengadopsi sistem pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision/RBS*). Sistem ini mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi risiko kerugian di masa yang akan datang. Pendekatan RBS menuntut komitmen pemegang saham maupun pengurus bank dalam meningkatkan kualitas sistem pengelolaan risiko termasuk menyangkut sumber daya manusia dan sistem informasi.

Jadi, yang namanya kepercayaan nasabah adalah pilar utama kelangsungan operasional perbankan. Pendekatan pengawasan yang dikembangkan semuanya ditujukan untuk mencegah kerugian perbankan yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan nasabah. Di samping itu, pengawasan bank juga dimaksudkan untuk mendorong terlaksananya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sekaligus saluran transmisi kebijakan moneter. Idealnya, ketiga tujuan pengawasan tersebut seiring sejalan dan tak terpisahkan untuk mendukung tujuan yang lebih besar yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk siapa *donk* pengawasan bank? Jelas, agar bank sehat, uang nasabah selamat, dan perekonomian kuat! ●

# Ngawasin Bank Dari Hulu ke Hilir

Masih banyak publik yang ingin tahu kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan bank. Apa saja sih? Ada dua pendekatan BI dalam melakukan pengawasan yakni pengawasan *macro-prudential* dan *micro-prudential*. Pengawasan *macro-prudential* digunakan dalam konteks mengawal stabilitas sistem keuangan dan makro ekonomi. Sedangkan pengawasan *micro-prudential* lebih ditujukan untuk memantau tingkat kesehatan bank secara individual.

Dalam konteks *micro-prudential*, terdapat empat kewenangan dasar yang diberi UU agar pengawasan berjalan efektif yakni perizinan, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi. Bisa dibayangkan seandainya wewenang, misalnya, memberi dan mencabut izin usaha bank berada di tangan institusi lain di luar lembaga pengawas bank. Apa jadinya ketika lembaga pengawas merekomendasikan agar sebuah bank dicabut izin usahanya, tapi institusi yang merilis izin mengatakan masih bisa diselamatkan. Benturan kepentingan akan terus terjadi. Begitu pula wewenang pengaturan dan

pemberian sanksi, bila salah satu atau keduanya tidak berada di tangan lembaga pengawas bank, maka institusi itu akan menjadi seperti macan ompong.

Kewenangan perizinan memungkinkan BI menetapkan persyaratan pendirian dan operasi suatu bank termasuk persyaratan kepemilikan dan kepengurusan di bank. Dengan demikian, hanya pihak-pihak yang memiliki integritas dan kemampuan/reputasi keuangan yang dapat menjadi pemilik bank. Sedangkan untuk pengurus bank selain dua syarat tadi juga harus punya kompetensi. Meskipun sudah mengantongi izin sebagai pemilik atau pengurus, namun apabila di kemudian hari tidak lagi memenuhi persyaratan, yang bersangkutan kudu keluar dari industri perbankan. Kewenangan pengawasan dan pengaturan memungkinkan BI untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bank guna memastikan bahwa seluruh ketentuan prinsip kehati-hatian, ditaati. Pada akhirnya, meskipun sudah memiliki tiga wewenang tersebut, pengawas bank akan menjadi seperti

tak bergigi apabila *nggak* memiliki wewenang menjatuhkan sanksi kepada Bank yang melanggar ketentuan.

Metode pengawasan bank bersifat dinamis seiring dengan perubahan lingkungan bisnis perbankan yang semakin kompleks. Pada tahun 2004 terjadi perubahan paradigma pengawasan bank dengan mengadopsi pengawasan bank berbasis risiko (*risk-based supervision/RBS*). Sebelumnya menggunakan pendekatan kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*). Dalam pendekatan RBS, pengawasan tidak lagi hanya melihat pada aspek kepatuhan bank, tetapi juga memperhitungkan berbagai risiko penting yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Konsep ini tidak hanya melihat kondisi saat ini dari bisnis perbankan tapi juga meneropong jauh ke depan termasuk menilai kemampuan bank dalam mengantisipasi potensi risiko kerugian ke depan (*forward looking*). Pendekatan RBS ini diyakini dapat memberi pemahaman lebih baik terhadap bisnis perbankan serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kinerja keuangan sehingga pengawas dapat membangun strategi dan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Jadi, bolehlah dikata, dengan bekal empat kewenangan tersebut di atas plus metode pengawasan yang baru, proses pengawasan bank dari hulu ke hilir berkembang dengan kualitas yang semakin baik.●

## Antara Pengawas Bank Dan Penilik Sekolah



Difi A. Johansyah,  
Kepala Biro Humas BI

Suatu hari, seorang kerabat menelpon saya minta ijin tidak bisa hadir di acara keluarga. Dia bilang harus lembur. Saya tanya lembur apa? “BI datang...BI datang...,” jawabnya dengan nada campur aduk antara cemas dan geram. Saya jadi geli dengan nada yang diucapkannya mirip teriakan, “Belanda datang... Belanda datang...” dalam salah satu lakon sandiwara 17 Agustus-an masa lalu di TVRI. Saya agak bingung dengan perilaku saudara saya ini karena dia kan kerja di sebuah bank yang sering mengiklankan diri sebagai bank terkemuka di republik ini. Kalau bener iklannya, maka tentunya bank itu rapi sehingga *nggak* perlu panik atau cemas. Wong, kerjaan pengawas bank dari Bank Indonesia (BI) itu intinya adalah memastikan agar bank menjalankan semua sistem dan prosedur kerja dengan baik berdasarkan aturan main yang telah digariskan BI.

Seketika saya jadi teringat cerita waktu masih di sekolah dasar dulu. Pernah suatu hari para guru merasa cemas dan galau dan para murid di *drill* untuk dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Rupanya sang penilik sekolah (PS) datang! Anehnya juga, para guru juga tidak menyebutkan nama PS sekolah tersebut, sehingga saya lebih mengenalnya dengan panggilan Pak PS. Nah, bayangan saya Pak PS ini pastilah menakutkan, mirip monster, karena guru yang paling angker dan kepala sekolah aja takut! Dan entah kenapa waktu itu juga saya merasakan suasana sekolah menjadi *ayem* dan nyaman. Yang saya inget Pak PS ini ternyata adalah seorang yang sudah tua dan jauh dari figur menakutkan. Dibutuhkan kedewasaan dan kemapanan untuk memastikan fungsi ajar mengajar di sebuah sekolah berjalan dengan baik.

Moral cerita di atas, antara pengawas bank dan penilik sekolah bahwa kedua orang ini menjalankan fungsi yang kurang lebih sama. Keduanya memastikan sesuatu berjalan sesuai dengan fungsinya, baik itu di bank maupun sekolah. Keduanya menjalankan fungsi yang mulia bagi kepentingan masyarakat. Bagi pengawas bank, kerjaan yang baik membuat sebuah bank menjadi sehat akan dianggap biasa, jarang ada pujian dan bahkan prestasi yang ada akan dialamatkan ke manajemen bank yang bersangkutan. Namun kalau ada kelemahan, walaupun itu memang karena banknya brengsek, omelannya bisa sekampung menyalahkan pengawas bank. Apa boleh buat, itulah konsekuensi mandat mengawasi sebuah bisnis yang namanya bank. Butuh ketegaran untuk menjadi pengawas bank!●

■ Risk Based Supervision:

# Metode Pengawasan Yang Antisipatif



Masagus Abdul Azis,  
Pengawas Bank Madya  
di Direktorat Pengawasan Bank 2

Kinerja suatu bank dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal bank. Faktor internal Bank terutama berkaitan dengan kompetensi dan integritas pengurus, pemilik, pejabat dan karyawan bank. Sedangkan faktor eksternal antara lain persaingan bisnis, perkembangan kondisi perekonomian, situasi politik, hukum, dan keamanan. Pengawas tidaklah melarang bank untuk mengambil risiko bisnis. Mengambil risiko merupakan keniscayaan dalam bisnis bank dalam rangka memperoleh keuntungan. High risk high return. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadinya bank yang merugi atau menjadi bank gagal. Bahkan potensi kerugian/kegagalan semakin besar apabila pemilik/pengurus bank lalai atau dengan sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian, pengendalian risiko dan ketentuan yang berlaku.

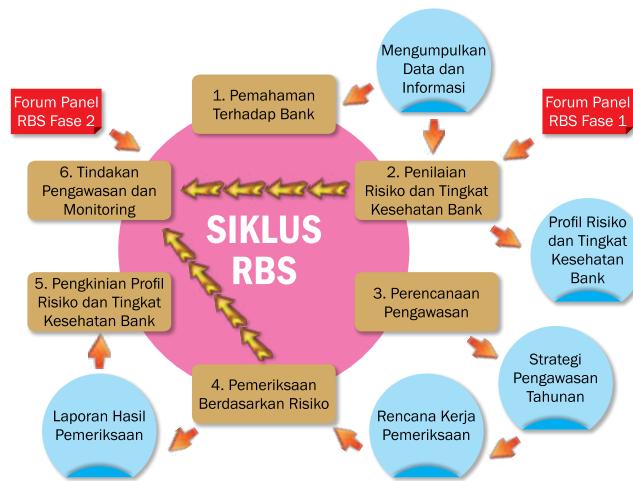
Pengawasan bank yang efektif memang memiliki peranan yang penting untuk menciptakan perbankan yang sehat. Namun, pengawas bank bukan bagian dari manajemen bank yang mengambil segala keputusan bisnis. Hidup-matinya atau untung-ruginya suatu bank lebih ditentukan oleh kemampuan manajemen bank menetapkan strategi bisnis yang tepat dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnisnya. Namun demikian, pengawas bank haruslah tetap menjalankan tugasnya seprofesional mungkin, termasuk menerapkan metode pengawasan bank berbasis risiko (Risk Based Supervision/RBS) yang saat ini berlaku sesuai standar internasional (best practice).

## Siklus RBS

Dalam pelaksanaan RBS, guna mendapat pemahaman yang lengkap akan profil risiko bank, pengawas bank menggunakan dua cara.

Pertama, pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dimana Pengawas Bank meneliti dan menganalisis laporan-laporan rutin dan non-rutin bank kepada BI serta informasi dari sumber-sumber lainnya. Kedua, pengawasan langsung (*on-site supervision*) dimana pengawas bank melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung di bank yang diawasi. Dalam keadaan normal, pemeriksaan dilakukan minimal setahun sekali.

Di dalam siklus RBS terdapat enam tahapan tugas yang dilaksanakan oleh Pengawas Bank. Pada tahapan pertama pengawas bank berupaya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bank yang diawasi serta faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank (*Know Your Bank - KYB*). Berdasarkan informasi KYB yang diperoleh,



Siklus Risk Based Supervision (RBS)

Pengawas Bank melakukan penilaian profil risiko delapan jenis, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategis, reputasi dan risiko hukum. Seiring dengan penilaian profil risiko, Pengawas Bank juga melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang didasarkan kepada enam faktor CAMELS yaitu *Capital, Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*. Mulai tahun 2012 (posisi penilaian 31 Desember 2011), penilaian profil risiko dan TKB akan diintegrasikan dengan mulai diterapkannya *Risk Based Bank Rating (RBBR)*. Di dalam RBBR, faktor-faktor penilaian mencakup profil risiko yang terdiri dari 8 jenis risiko tersebut di atas ditambah faktor *good corporate governance (GCG)*, permodalan (*capital*) dan rentabilitas (*earnings*).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian RBBR, pengawas bank menyusun perencanaan pengawasan yang di dalamnya antara lain mencakup strategi pengawasan dan penetapan status pengawasan (normal, intensif atau khusus) serta penetapan rencana dan fokus pemeriksaan berbasis risiko. Dalam pemeriksaan berbasis risiko, pengawas bank memfokuskan pemeriksaan kepada aktivitas bisnis bank tertentu yang dinilai memiliki risiko paling signifikan atau berpotensi menimbulkan permasalahan bagi bank.

Hasil pemeriksaan berbasis risiko selanjutnya digunakan sebagai salah satu informasi utama yang digunakan dalam pengkinian RBBR secara berkala ataupun dalam hal ditemukan perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank secara signifikan. Pada tahap terakhir siklus RBS, pengawas bank menetapkan dan melaksanakan tindak pengawasan (*supervisory actions*) serta memantau langkah-langkah yang dilaksanakan manajemen bank untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian pengawas bank. Setelah tahapan ini, pemahaman pengawas bank sudah semakin komprehensif untuk selanjutnya memulai kembali siklus RBS.

Sebagai upaya *quality assurance* dan peningkatan kualitas pengawasan bank secara berkelanjutan (*continuous improvement*), penilaian profil risiko, tingkat kesehatan, perencanaan dan strategi pengawasan serta tindakan pengawasan dan pemantauannya dievaluasi secara berkala oleh "panel ahli" yang terdiri dari para pengawas bank yang dinilai senior dan memiliki pengalaman yang luas. Hasil evaluasi panel ahli tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pengawas bank agar kualitas pengawasan ke depan semakin baik.

Kalaupun pengawas bank sudah memiliki pemahaman yang komprehensif atas bank yang diawasi, itu bukanlah berarti pengawas bank tahu segala-galanya seperti malaikat dan "menjamin" bank yang diawasi akan aman. Mengapa? Bank for International Settlement (BIS), lembaga internasional yang merilis RBS pun mengigatkan bahwa "RBS bukanlah tongkat sihir yang bisa menyelesaikan segala permasalahan secara cepat, dan juga obat mujarab dari kesalahan pengelolaan ekonomi." Jadi, soal mati atau hidupnya bank bukanlah berada ditangan pengawas bank, tapi ditentukan terutama oleh pengurus dan pemilik bank. Nah, bank yang sehat adalah yang mampu mengelola risiko menjadi peluang yang memberi untung. ●

■ **Know Your Bank:**

# Karena Tahu, Gundahpun berlalu...



Ahmad Berlian,  
Peneliti Eksekutif  
di Direktorat Penelitian  
dan Pengaturan Perbankan BI

Bagaimana cara memilih bank yang sehat....? Pertanyaan tersebut selalu muncul di benak setiap orang ingin mengetahui kondisi bank. Ada berbagai motif orang memilih bank, satu dengan yang lain mungkin sangat berbeda. Ada yang bilang, memilih bank sama seperti memilih pasangan hidup, cermati bibit, bobot dan bebek. Bukankah tidak sedikit yang hanya memperhatikan imbal hasil atau suku bunga yang ditawarkan, semakin tinggi, makin diminati. Di pihak lain, ada juga yang sangat cermat. Dianalisa mulai dari siapa pemiliknya, jajaran pengurus, jaringan kantor yang tersebar luas, keberagaman produk dan layanan, ketersediaan fasilitas *electronic banking* hingga analisis terhadap kondisi keuangannya. Alhasil, semua terpulung pada kebutuhan masing-masing.

Apapun motif orang dalam memilih suatu bank, semua akan kembali pada pertanyaan awal, sehatkah bank saya? Bisakah pilihan itu bikin tidur nyenyak saat uang telah dipindahkan ke bank tersebut?

Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, menetapkan ketentuan tingkat kesehatan berbasis risiko dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu permodalan, rentabilitas, *good corporate governance* (GCG) dan profil risiko. Karena bersifat rahasia, memang hasil penilaian tingkat kesehatan setiap bank tidak diumumkan kepada masyarakat, tetapi digunakan untuk menetapkan kebijakan atau tindakan pengawasan agar kinerja bank tetap prima alias sehat. Pertanyaannya, apakah masyarakat dibikin buta sama sekali atas kinerja bank? Tentu, tidak. Untuk kepentingan stakeholder dan sebagai wujud implementasi GCG, BI menerbitkan ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan. Beleid ini mewajibkan bank mempublikasikan kondisi keuangannya berupa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan (LKPT).

LKPT tersebut antara lain memuat Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Daftar Komitmen dan Kontinjen, Transaksi Spot dan Derivatif, Kualitas Aset Produktif, Perhitungan Kewajiban Modal Minimum, rasio

keuangan, pemenuhan ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Giro Wajib Minimum (GWM) serta informasi mengenai pengurus dan pemegang saham bank. Pokoknya, rasio keuangan dalam LKPT merupakan rasio keuangan utama yang dapat dijadikan indikator mengenai kinerja suatu bank. Beberapa rasio tersebut akan semakin bermakna apabila dibandingkan dengan kriteria Status Pengawasan Bank.

Yuk, sekarang coba menelisik makna apa dari rasio keuangan yang tercantum dalam LKPT. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR), misalnya. Rasio ini mencerminkan pemenuhan modal minimum. Perlu diketahui bahwa bank merupakan industri yang haus modal. Tanpa tersedia modal yang memadai, maka dapat dipastikan tidak akan berkembang. Modal juga mencerminkan kinerja/kualitas manajemen bank (direksi dan komisaris). Pengelolaan yang serampangan akan membuahkan aset yang berkualitas buruk dan ujung-ujungnya akan menggerogoti modal. Sebaliknya manajemen yang profesional dan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko secara terukur, akan menghasilkan laba sehingga kian memperkokoh permodalan bank. Oleh karenanya KPMM merupakan salah satu faktor yang fundamental bagi suatu bank. Lantas, bagaimana bank yang KPMM-nya dibawah 8%? Sesuai ketentuan BI maka bank tersebut termasuk bermasalah (Bank Dalam Pengawasan Khusus). Pilihannya hanya satu, segera tambah modal atau silahkan henggang dari jagad perbankan.

Faktor fundamental kedua adalah Likuiditas. Sering dianalogikan sebagai darah bagi tubuh manusia. Bagaimana jadinya kalau nasabah tidak bisa menarik dananya sewaktu-waktu. Dalam era teknologi saat ini, berita tersebut akan sangat cepat tersebar. Kalau itu terjadi, bukan mustahil bank akan ambruk dalam sehari. Salah satu indikator kondisi likuiditas tercermin dari pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), meskipun untuk yang satu ini diperlukan analisis yang komprehensif dan mendalam. Banyak faktor penyebab terjadinya permasalahan likuiditas yang mendasar. Salah satunya karena aset produktif (kredit) yang berkualitas buruk alias macet sehingga aliran dana masuk menjadi terbatas. Disamping itu dapat juga terjadi karena salah urus

(*mismatch*) akibat sumber dana jangka pendek diinvestasikan jangka panjang. Hal serupa dapat pula dipicu karena ekspansi usaha secara berlebihan. Mungkin saja masalah likuiditas diatasi dengan mengiming-imingi nasabah/calon nasabah dengan suku bunga yang lebih tinggi dari bank pada umumnya. Bahkan ada pula yang memberikan suku bunga di atas penjaminan baik secara langsung maupun tidak. Bisa juga untuk menghindari pelanggaran GWM, pinjaman antar bank dilakukan. Untuk yang satu ini relatif mudah mendeteksinya, antara lain terkurangnya *secondary reserve* serta perubahan posisi secara drastis dari *net lender* menjadi *net borrower* di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Faktor fundamental ketiga adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang dibatasi maksimal 5%. Informasi mengenai indikator NPL disajikan secara terang benderang dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Indikator pendukung lainnya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dapat menggambarkan apakah bank konsisten menjalankan fungsi intermediasinya dan sekaligus pula memperlihatkan kemana dana para nasabah diinvestasikan. Pada umumnya, bank yang memiliki LDR tinggi mampu menciptakan pendapatan yang lebih baik. Tentunya apabila NPL dapat dikendalikan dengan baik pula sehingga *Net Interest Margin* (NIM) dapat tumbuh dengan wajar, hal ini akan dapat dilihat secara lebih jernih apabila analisis dilakukan secara berkala.

Kalau nasabah ingin melihat informasi kondisi kinerja bank dengan lebih komprehensif, silahkan tengok Laporan Tahunan. Dalam Laporan itu, akan tersaji informasi aspek kualitatif yang tidak diperoleh dari LPKT. Ambil contoh, adanya catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh Akuntan Publik, kualitas manajemen risiko, implementasi GCG, pengendalian internal serta kualitas SDM yang dimiliki bank.

Alhasil, sedalam apa keingintahuan nasabah mengenai kinerja suatu bank, semuanya terpulung kepada kebutuhan masing-masing. Lebih bijak kalau besaran suku bunga hanya menjadi salah satu pertimbangan, namun bukan satu-satunya. Nah, semakin tahu *jeroan* bank, bikin hati yang gundah inipun berlalu. Jadi, Ayo ke Bank! ●

**Pengelolaan yang serampangan akan membuahkan aset yang berkualitas buruk dan ujung-ujungnya akan menggerogoti modal.**

## ■ Basel Core Principles:

# Acuan Pengawasan Bank Yang Efektif

Ketika Indonesia dalam tahun 2009/2010 dinilai oleh IMF dan World Bank dalam program penilaian sektor keuangan (*financial sector assessment program/FSAP*), acapkali banyak yang bertanya apa itu *Basel Core Principles* (BCP)? Mengapa digadang seakan menjadi *key success factor* stabilitas sistem keuangan? Pertanyaan wajar bagi banyak orang yang awam dengan pengawasan bank. Jawaban singkatnya, BCP adalah 25 prinsip pengawasan bank yang efektif yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

BCP menjadi standar global dan substansinya sangat komprehensif, yaitu memuat materi mulai dari kedudukan dan status pengawas, perlindungan



**Imansyah,**  
Peneliti Eksekutif  
di Direktorat Penelitian  
dan Pengaturan Perbankan BI

hukum pengawas, ketentuan kehati-hatian, manajemen risiko, standar akuntansi, anti pencucian uang, kerangka dan metode pengawasan bank sampai dengan kerjasama pengawasan lintas batas. Banyak otoritas pengawas yang sudah melakukan *self-assessment* atas BCP untuk mengetahui kualitas pengawasan bank yang dimiliki.

Tak pelak, BI telah pula melakukan hal serupa beberapa kali untuk mengetahui apa setiap prinsip dalam BCP kualitasnya sudah “*compliant*”, “*largely compliant*”, masih “*materially non-compliant*”, atau bahkan sama sekali “*non-compliant*”. Kalau dua kualitas pertama mengindikasikan performa yang baik, dua kualitas berikutnya menunjukkan perlunya

perbaikan dalam pengawasan bank yang ditentukan oleh adanya ketentuan dan terbukti ketentuan tersebut telah diterapkan secara efektif.

Bagaimana status BCP ini untuk Indonesia? Di FSAP tahun lalu, kualitas pengawasan bank oleh BI dinilai telah baik dengan hanya 5 prinsip yang *materially non-compliant* dan 3 prinsip yang *non-compliant*. Catatan terakhir, tentu masih ada yang bertanya apa memang ada guna dari *compliance* dengan BCP ini? Studi IMF tahun 2006 menyimpulkan adanya dampak positif dari *compliance* perbankan dengan BCP berupa kredit bermasalah yang rendah dan semakin effisiennya operasional bank.

Kalau demikian halnya, menjadi keniscayaan bagi BI untuk secara berkesinambungan memperbaiki kualitas *compliance* terhadap BCP demi perbaikan kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. ●

## ■ Pengawasan Bank Lintas Batas :

# Kerja Bareng Antar Otoritas

Tidak dapat dipungkiri kehadiran grup bank internasional di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Ragam kehadiran bank tersebut beraneka bentuk, kantor cabang (KC) atau perusahaan anak. Ini dipicu oleh iklim usaha perbankan di Indonesia dengan pasar yang besar menjanjikan imbal investasi yang menarik.

Sebagai suatu grup bank internasional tidak terbantahkan bahwa bank ini memiliki keunggulan berkompetisi yang lebih baik dan teruji dibanding bank-bank yang hanya berbisnis lokal. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan juga beraneka rupa, yang berdampak pada risiko yang meningkat baik bagi bank terlebih kepada nasabah. Sebagai bagian dari grup bank internasional, profil risiko KC atau perusahaan



**Dian Purwaningsih,**  
Peneliti Junior  
di Direktorat Penelitian  
dan Pengaturan Perbankan

anak dipengaruhi oleh kondisi grup secara internasional, sehingga memburuknya kondisi kantor pusat dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di banyak negara lain.

Agar stabilitas sistem keuangan tetap dapat dipelihara, maka perlu pengawasan bank yang lebih handal. Namun karena ini bertaut dengan grup bank internasional, maka perlu kerjasama pengawasan dengan otoritas pengawas bank negara lain. Konsep ini yang disebut “*home and host relationship*” untuk pelaksanaan pengawasan bank lintas batas (*cross border banking supervision*).

Dalam konsep ini, pengawasan yang efektif atas grup bank internasional sangat ditentukan oleh 2 sisi, yaitu di tingkat lokal oleh pengawas bank setempat (*host supervisors*) dan di tingkat konsolidasi oleh pengawas bank perusahaan induk (*home supervisors*). Untuk tujuan ini, banyak cara yang ditempuh, namun yang paling dapat diandalkan adalah melalui *memorandum of understandings* (MoU).

Substansi MoU ini secara umum memuat pertukaran informasi hasil pengawasan, baik dalam kondisi normal maupun krisis. Hingga hari ini, BI telah menandatangani MoU dengan Bank Negara Malaysia (BNM), *China Banking Regulatory Commission* (CBRC) dan *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Ini akan berlanjut dengan otoritas pengawas dari Korea Selatan, Australia dan negara lain yang representasi banknya cukup besar di Indonesia.

Efektifitas MoU ini telah teruji dalam pelaksanaan *bilateral supervisor meeting* antara BI dan BNM, dimana hasil pengawasan bank dipertukarkan termasuk juga komitmen yang dimintakan dari pemilik dan pengurus bank. MOU dengan CBRC bahkan menjadi syarat untuk pembukaan KC bank nasional di Cina.

Apa yang telah dilakukan BI tersebut dimaksudkan agar pengawasan bank lintas batas menjadi semakin efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan baik di *home* maupun *host country*. ●

# Pengaturan Dan Pengawasan Bank



## Ketawa ala B!

### Cinderella

Seorang konsultan pajak baru saja membaca kisah Cinderella ke putrinya yang berumur empat tahun untuk pertama kalinya. Gadis kecil itu terpesona oleh cerita, terutama bagian di mana labu berubah menjadi kereta emas. Tiba-tiba anaknya mengangkat pembicaraan, "Ayah, ketika labu berubah menjadi kereta emas, akan digolongkan sebagai pendapatan (income) atau keuntungan modal (capital gain) jangka panjang?"

### Menantu Sayang Mertua

Suatu hari ada seorang nenek2 tuaaa sekali berjalan di tepi jalan raya keluar dari pasar dekat kampungnya. Karena kondisi jalan yang sepi, dengan tiba2 itu nenek nyebrang. Apesnya datang seorang pemuda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kontan saja pemuda itu menekan rem keras2. Sontak pemuda itu marah "Dasar nenek2 guoblook!! nyebrang ga liat2!!" Karena kaget mau ditabrak dan dibentak nenek itu pun marah "Yang GUUUOBLOKnya bukan main itu kamu!! Masak nabrak nenek-nenek aja gak kena??!!!!"

### Salesman Penghisap Debu

Seorang salesman alat penghisap debu menuju ke sebuah rumah. Diketuknya pintu depan. Sebelum sempat nyonya rumah itu berkata sepatah katapun, ia menghamburkan segala macam sampah ke karpet ruang tamu. "Nyonya," katanya, "saya yakin akan kemampuan mesin ini. Karpet ini akan bersih kembali dalam sekejap. Jika nanti masih ada kotoran yang tertinggal, saya bersedia memakannya." "Kalau begitu," kata nyonya itu, "mulailah makan. Kami belum punya listrik."

## Maaf Telat...

Ada 4 orang mahasiswa yang kebetulan telat ikut ujian semester karena bangun kesiangan. Mereka lantas menyusun strategi untuk kompak kasih alasan yang sama agar dosen mereka berbaik hati memberi ujian susulan. Mahasiswa A: pak, maaf kami telat ikut ujian semester. mahasiswa B: iya pak. Kami berempat naik angkot yg sama dan ban angkotnya meletus. Mahasiswa C: iya kami kasihan sama supirnya. Jadinya kami bantu dia pasang ban baru. mahasiswa D: oleh karena itu kami mohon kebaikan hati bapak untuk kami mengikuti ujian susulan. Sang dosen berpikir sejenak dan akhirnya memperbolehkan mereka ikut ujian susulan. Keesokan hari ujian susulan dilaksanakan, tapi keempat mahasiswa diminta mengerjakan ujian di 4 ruangan yg berbeda. "Ah, mungkin biar tidak menyontek," pikir para mahasiswa. Ternyata ujiannya cuma ada 2 soal. Dengan ketentuan mereka baru diperbolehkan melihat dan mengerjakan soal kedua setelah selesai mengerjakan soal pertama. Soal pertama sangat mudah dengan bobot nilai 10. Keempat mahasiswa mengerjakan dengan senyum senyum. Giliran membaca soal kedua dengan bobot nilai 90. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Di soal kedua tertulis: "Kemarin, ban angkot sebelah mana yang meletus?"

■ **MCBG G-20 Meeting:**

# Syukurlah, Krisis Eropa Tak Mengimbas Indonesia



Dunia saat ini sedang mencemasi krisis utang negara-negara Eropa yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Di tengah suasana seperti inilah *Ministers and Central Bank Governors (MCBG) of the G-20* berkumpul di Paris, Perancis, 14-15 Oktober 2011. Mereka sepakat untuk memperkuat koordinasi kebijakan global, menaruh perhatian serius atas implementasi prioritas agenda jangka pendek dan menengah terkait reformasi perekonomian global, dan terciptanya kerangka pembangunan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang. Delegasi Indonesia dalam pertemuan

ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution

Dalam pertemuan itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20 menyokong negara-negara Eurozone mengambil langkah nyata dalam mengurai krisis utang di kawasan tersebut. Pertemuan itu juga berupaya memperkuat dan meningkatkan fleksibilitas pemakaian “Dana Stabilitas Keuangan Eropa” (*European Financial Stability Funds/ EFSF*). G-20 juga terus berkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas EFSF guna mencegah efek rambatan dari Eurozone ke kawasan-kawasan lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati draft Rencana Tindak (*Action Plan*) yang berisi serangkaian kebijakan yang terkoordinasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi global.

Di sela-sela menghadiri pertemuan tersebut, GBI Darmin Nasution menyempatkan diri mampir ke London untuk menggelar pertemuan dengan masyarakat dan pelajar Indonesia di sana. Dalam pertemuan

yang mengambil tempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London itu, GBI menyampaikan garis besar pertemuan MCGB dan keyakinannya bahwa krisis utang di kawasan Eropa diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai ekspor Indonesia yang jauh lebih kuat ketimbang negara Asia lainnya seperti Filipina, Malaysia dan Singapura. “Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan dan fundamental ekonomi baik sehingga tidak terpengaruh langsung dampak krisis tersebut,” papar GBI yang didampingi anggota Dewan Gubernur BI Hartadi Sarwono.

Meski tetap mewaspadai efek krisis utang di Eropa, sejumlah langkah antisipasi telah diambil Pemerintah. Misalnya, penghematan dan disiplin anggaran dengan menjaga tingkat rasio utang luar negeri tak lebih dari 26% dan dengan tren terus menurun. Defisit anggaran Pemerintah dipatok tak lebih dari 3% dan ekspor bersumber daya alam yang dapat menjadi *bumper* menghadapi krisis. ●

## Bisa Lho ... Kapal Nelayan Jadi Agunan



Nelayan di seantero jagad bumi pertiwi kini semakin bisa tersenyum. Ya, maklumlah bila selama ini mereka seperti warga negara “kelas dua” yang tak terjangkau layanan perbankan, kini hal itu dimungkinkan. Caranya? Bila nelayan butuh dana segar untuk modal kerja atau keperluan lain, bisa

lho mengagunkan kapal dan tanah yang mereka miliki. Kapal sebesar apa yang bisa diagunkan ke bank? Tidak terlalu besar *kok*. Bank Indonesia mematok setidaknya ukuran kapal 20 meter kubik atau setara 5 gross ton sudah bisa dijadikan agunan. Kisaran kredit yang dimungkinkan antara Rp1,2 miliar hingga Rp2 miliar untuk kapal dan tanah.

“Dengan begitu, tak hanya pemodal besar yang dibantu, tetapi juga nelayan yang kemampuan ekonominya lebih kecil dan tidak memiliki cukup agunan untuk dijamin selain kapal yang digunakannya melaut,” ujar Gubernur Bank Indonesia (GBI) Darmin Nasution saat membuka *workshop* “Prospek Pembiayaan Sektor Perikanan Tangkap” di Jakarta, 26 Oktober. Lokakarya yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memperkenalkan skim

pembiayaan yang sudah dikurcurkan beberapa bank dengan sokongan asuransi ke pelaku ekonomi sektor perikanan tangkap.

Menurut Darmin Nasution, peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam hal pembiayaan sangat penting demi pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan. “Kesepakatan antara perbankan dan lembaga keuangan akan menciptakan kemandirian bagi para nelayan, sehingga mereka bisa menghindari bunga tinggi dari para pemodal uang. Sekarang, kapal berkapasitas lima gross ton sah untuk agunan tambahan,” tandas GBI di lokakarya yang dihadiri pula Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo. Untuk membantu nelayan memenuhi kriteria tersebut, pihak Kementerian akan membantu penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SEHAT) dan Buku Kapal Perikanan (BKP). ●

# Gunung Bromo Pun Kini Disesaki Jamur

**B**oomm ..... suara ledakan muntahan debu vulkanik menutupi seantero kawasan wisata Gunung Bromo, di Jawa Timur, beberapa waktu silam. Seketika wajah perkampungan di sekitar gunung itu pun tampak abu-abu tertutup abu vulkanik dan tak terkecuali areal tanaman sayur-mayur. Ya, wilayah di sekitar Bromo memang dikenal sebagai penghasil kubis, sawi, kentang, bawang merah dan sayuran lainnya untuk memenuhi kebutuhan kota-kota di wilayah Jawa Timur. Semburan abu vulkanik itupun ikut melumatkan tanaman sayur-mayur tersebut sehingga tak bisa dipanen. Petani pun hanya bisa gigit jari seraya menghitung kehilangan pendapatan yang tak sedikit. Denyut nadi perekonomian di wilayah sentra sayur-mayur itu pun sesaat meredup.

Sampai kapan nestapa ini akan berlalu? Begitulah keluh petani sayur-mayur di sana. Petani pun dihadapkan dua pilihan untuk mengurai masalah. Pertama, menanti sampai abu vulkanik berlalu dan pemulihan lahan, namun hal ini penuh dengan ketidakpastian sampai kapan. Atau alternatif kedua, mencoba peruntungan di bidang lain. Para petani pun sampai pada kesimpulan untuk memilih



alternatif kedua dengan menjajal bertani jamur kancing. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan. Selain budaya bertani sudah melekat bagi masyarakat Bromo, jamur kancing juga cocok untuk topografi dan iklim Bromo yang mensyaratkan budidaya di ketinggian di atas 1800 meter di atas permukaan laut. Yang bikin kepincut lagi karena budidaya jamur kancing memberi margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding sayur-mayur.

Setelah melihat peluang bisnis menarik dari budidaya jamur kancing, petani pun membentuk wadah bernama *Bromo Champ Community* (BCC). Lembaga ini dibentuk atas prakarsa Kadin Kabupaten Probolinggo, Pemprov Jawa Timur dan Asosiasi Pekerja Konstruksi (APKSI) Jatim sebagai wujud keprihatinan atas musibah

Gunung Bromo. BCC mendapat mandat untuk memperkenalkan dan mengedukasi petani akan budidaya jamur kancing sekaligus pendampingan teknis hingga pemasaran. Setelah tiga bulan budidaya jamur kancing diperkenalkan, setidaknya sudah 85 orang petani ikut serta. Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang pun menyokong upaya BCC dengan mengucurkan dana bergulir sebesar Rp25 juta melalui program Bank Indonesia Social Responsibility (BSR) yang diteken 2 Oktober 2011. Peran KBI adalah sebagai fasilitator, penguatan kelembagaan dan dukungan lainnya.

Untuk membantu pemasaran hasil budidaya jamur kancing BCC, syukurulah sudah ada eksportir yang menampung. Diperkirakan dalam waktu dekat, produksi jamur bisa mencapai 300 ton sebulan dengan melibatkan 1.000 petani. Selain mengembangkan jamur kancing, BCC juga menjajal budidaya jamur tiram yang lebih cocok ditanam di dataran rendah seperti di desa Sapikerep sampai Sukapura di wilayah Bromo. Pada Juli lalu dilakukan panen perdana jamur kancing dan tiram yang diolah menjadi aneka pangan bergizi tinggi ke masyarakat. Masyarakat merespons positif. Petani pun semakin bergairah mengusahakan jamur yang bikin semua pihak yang terlibat dalam menyokong BCC pun optimistis bila kelak kawasan wisata Bromo akan bertambah satu lagi obyek menarik selain keindahan Gunung Bromo yakni hamparan luas budidaya jamur terbesar di dunia.●

# Desain Baru Rupiah Lawas

**S**ebuah desain baru dari pecahan Rp20 ribu tahun emisi (TE) 2004, Rp50 ribu TE 2005 dan Rp100 ribu TE 2004 dirilis Bank Indonesia kepada masyarakat, 28 Oktober. Wajah baru ketiga uang rupiah lawas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan tindak pemalsuan dan memudahkan masyarakat mengenal ciri keaslian uang rupiah. Wajah baru ini bukanlah emisi uang baru.

Secara umum perubahan wajah ketiga nominal uang tersebut boleh dibilang minor saja. Misalnya, gambar utama, ukuran uang, warna dominan dan bahan uang tetaplah sama. Yang menonjol dari desain baru ini yakni unsur pengaman yang mudah dikenali tanpa alat bantu sehingga dengan cepat dapat mengenal ciri keaslian uang rupiah. Nah, dengan begitu kan masyarakat akan semakin terlindungi dari upaya praktik pemalsuan uang. Ada 3 ciri utama tambahan di ketiga desain baru tersebut, yaitu



- Penambahan unsur pengaman rainbow printing di sebelah kanan gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi).
- Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan uang dan belakang uang;
- Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah empat persegi panjang yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio).

Khusus untuk pecahan Rp100.000, ada penambahan penulisan DEWAN PERWAKILAN DAERAH pada gambar utama setelah kata MPR dan DPR, seiring dengan perubahan nama gedung tersebut.

Informasi lengkap untuk mengenal ciri keaslian uang Rupiah dapat dilihat pada website Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) di menu Sistem Pembayaran > Instrumen Pembayaran Tunai.●